

## **“Potret Hari H”**

### **Sebuah Studi Hasil Pemantauan Hari H Pemungutan & Penghitungan Suara Oleh. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)**

Rabu, 15 Februari 2017 pagi hujan turun membasahi bumi pertiwi yang sedang menggelar pesta demokrasi lokal secara serentak di 101 daerah. Meski sedikit basah dan becek, tidak sama sekali menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan satu hari sebelum hari pemungutan suara dibuka, para warga sudah sibuk menyiapkan TPS di ruang terbuka dengan berbagai hiasan.

Dalam rangka ikut serta meramaikan dan memeriahkan penyelenggaraan Pilkada Serentak gelombang ke dua, sebagai lembaga yang memiliki fokus perhatian terhadap pemilihan, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak 2017. Selain menentukan kualitas dan legitimasi proses dan hasil pemilu, partisipasi masyarakat dalam wujud pemantauan di penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu indikator dasar demokratis tidaknya pemilu (Surbakti & Supriyanto 2013, hlm. 1). Jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu seorang pemantau mampu merekam dan melaporkan apa yang terjadi. Sehingga kehadiran pemantau setidaknya mampu menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Terdapat dua bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Perludem. Pertama, pemantauan lapangan yang dilakukan di beberapa TPS dengan delapan sebaran daerah Tebet Timur, Ciganjur, Kedaung, Bintaro, Petukangan, Ciracas, Cijantung, dan Warakas Tanjung Priok. Kedua, pemantauan melalui media elektronik Televisi dan berita online, serta media cetak koran yang di antaranya: Metro TV, Kompas TV, TV One, TVRI. Media cetak atau koran yang terdiri dari Kompas, Tempo, Republika, dan Media Indonesia. Sedangkan media online terdiri dari tribunnews.com, merdeka.com, kompas.com, vivanews.com, cnn.com, RoL.com, dan tempo.com.

Pemantauan ini ditujukan untuk memotret dinamika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Mulai dari persiapan berbagai perlengkapan Tempat Pemungutan Suara, sampai dengan sejauh mana proses penghitungan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi prosesnya. Secara lebih spesifik terdapat dua dimensi utama yang menjadi fokus pemantauan yakni pra-pemungutan suara atau H – 1 dan hari H pemungutan dan penghitungan suara.

#### **H -1 Pemungutan & Penghitungan Suara**

Dari hasil pemantauan lapangan di tujuh daerah, tidak ada satupun atribut atau alat peraga kampanye seperti baliho, sepanduk, bendera, dan umbul-umbul. Temuan ini berbeda dengan hasil pantauan media. Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh satu hari sebelum pemungutan suara para petugas penyelenggara pemilu masih sibuk membersihkan alat peraga.

Begitu pula dengan kasus politik uang. Dari tujuh daerah yang dipantau oleh tim perludem, tidak ada satupun didapati praktik politik uang dalam bentuk *vote buying*, *club goods*, ataupun *pork barrel*. Sedangkan dari pantauan media yang ada pelanggaran pidana pemilu masih marak terjadi yang salah satunya mengenai politik uang. Di Batu misalnya, berdasarkan hasil temuan masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu Kota Batu memeriksa seorang camat yang diduga ikut terlibat dalam membagi-bagikan mukena dan sarung berikut uang sejumlah Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-.

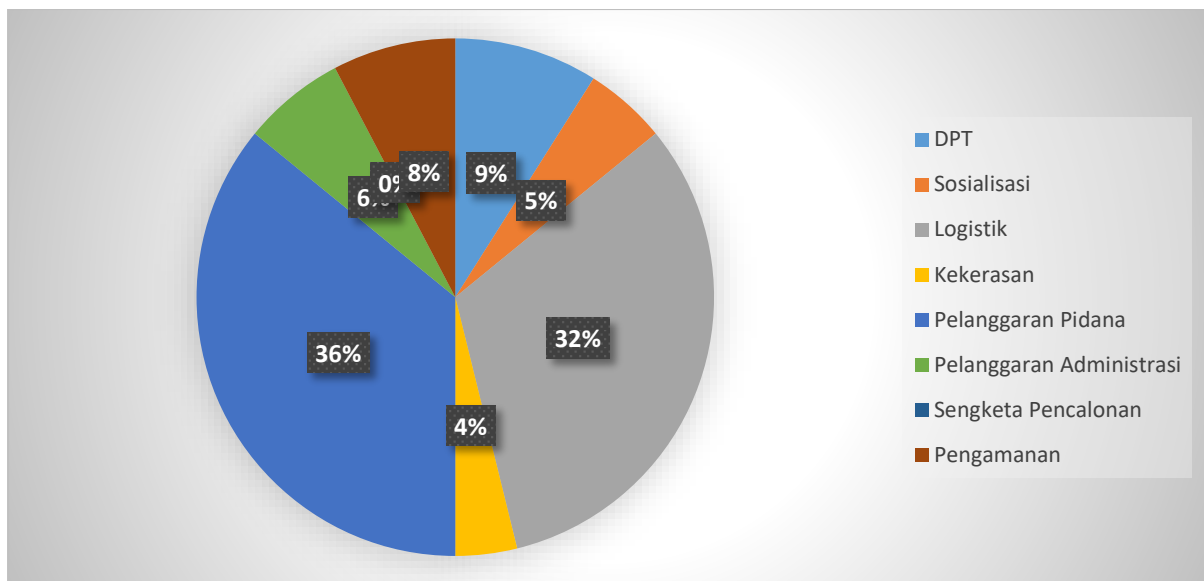
Hal serupa terjadi pula di Jepara dengan nominal Rp.5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-. Selain berwujud uang, dugaan politik uang terjadi pula dalam instrumen barang dan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sembako. Selain itu, di Kab. Pati, Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal juga terjadi politik uang. Nominal politik uang yang ditemukan dan sudah dilaporkan ke pengawas pemilu adalah Rp. 15.000,-.

Untuk kesiapan logistik hari pemungutan suara di delapan daerah yang dipantau, sebagian besar TPS sudah didirikan satu hari sebelum pemungutan suara di area yang terbuka seperti jalan raya, tanah lapang, taman bermain, halaman pos kamling, dan halaman RW setempat. Hanya saja masih didapati beberapa TPS yang memiliki kontur berundak yang tentunya menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk datang ke TPS tersebut.

Namun demikian, situasi berbeda terjadi di daerah Cijantung. TPS didirikan mendadak, padahal satu hari sebelumnya sudah disiapkan TPS di gedung sekolah, namun berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI, TPS tidak boleh didirikan di dalam kompleks yang mengandung unsur militer sehingga RW beserta Danramil memindahkan TPS 12 jam sebelum pemungutan suara.

Untuk hasil pemantauan media, isu logistik menjadi temuan tertinggi kedua 32% setelah pelanggaran pidana dengan tone positif yakni tidak ada kendala yang berarti dalam pendistribusian logistik menjelang hari pemungutan suara. Hanya di Kabupaten Pati yang sedikit mengalami hambatan pendistribusian yang diakibatkan cuaca ekstrim dan banjir sehingga beberapa titik harus didistribusikan menggunakan perahu karet. Belum lagi terdapat beberapa TPS yang terendam banjir. Selain itu di Kulon Progo ditemukan 1705 surat suara dan 31.210 surat suara rusak di Pigub Banten.

Untuk pengamanan jalannya pemungutan suara sendiri sebanyak 8% dan dari data pemantauan media yang ada menunjukkan tidak adanya persoalan yang berarti. Sebagian besar aparat pengamanan seperti TNI dan Polri sudah siap-siaga untuk mengamankan dan menjamin kelancaran Pilkada Serentak gelombang ke dua ini. Untuk TNI saja misalnya, kurang lebih terdapat 11.000 personil TNI yang ditugaskan untuk mengamankan proses Pilkada.



### Hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara

Merujuk pada peraturan yang ada, para pemilih sudah dapat memberikan suaranya di balik bilik suara sejak Jam 07.00 pagi. Akan tetapi pada realitasnya dari beberapa TPS yang dipantau masih terdapat beberapa TPS yang dibuka sekitar Pukul 07.10 dan 07.30.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan pada hari H pemungutan suara ialah, setiap Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) diwajibkan untuk memasang Daftar Pemilih di sekitaran TPS yang mudah dilihat oleh pemilih untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum. Keseluruhan TPS yang dipantau di delapan daerah oleh tim Perludem memasang DPT dekat pintu masuk TPS yang mudah dilihat oleh pemilih. Akan tetapi format penempelan yang dilakukan oleh KPPS berbeda-beda. Terdapat TPS yang menempelkan DPT perlembar dalam papan informasi sehingga memudahkan pemilih untuk mengecek dirinya sudah terdaftar atau belum.

Di Petungkang sebelum pemungutan suara sempat tertunda akibat terdapat salah satu saksi pasangan calon yang menggunakan pakaian dengan atribut salah satu kandidat kepala daerah. Namun pada akhirnya diperbolehkan karena berdasarkan peraturan terbaru masih diperbolehkan menggunakan pakaian ke “khas”an dari masing-masing kandidat selagi tidak ada logo partai, nomor urut ataupun gambar paslon.

Pada sisi lain, terdapat hal menarik yang patut dijadikan rujukan oleh KPPS lainnya dalam rangka mejamin hak konstitusional warga negara. Di salah satu apartemen di Duren Kalibata, terdapat salah satu anggota KPPS yang berperan aktif memastikan setiap orang yang akan memilih menggunakan kartu identitas kependudukan benar-benar bertempat tinggal di daerah tersebut melalui teknologi informasi “Sistem Daftar Pemilih” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Sidalih”. Karena dalam ketentuan perundang-undangan yang ada ditambah dengan semangat penyelenggara pemilu untuk memastikan setiap hak pilih warga negara terfasilitasi tanpa terkecuali termasuk yang tidak terdaftar dalam DPT. Diberlakukan ketentuan untuk tetap memilih dengan catatan menunjukkan kartu identitas kependudukan

dan dapat memberikan suaranya sejak pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Mekanisme ini kemudian lebih dikenal dalam istilah Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sehingga untuk memastikan seorang pemilih yang menggunakan KTP berasal dari daerah tersebut. Seorang petugas KPPS di Kalibata tersebut berdiri tepat di pintu masuk sambil memegang telepon genggam yang dimiliki dan membuka situs <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/nasional>. Setiap individu yang berniat memberikan hak pilihnya menggunakan kartu identitas kependudukan secara satu persatu ditanyakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dicek keabsahannya melalui sistem Sidalih apakah individu tersebut terdaftar dalam DPT dan berdomisili di sekitar lokasi TPS itu berdiri. Bagi pemilih yang memang berdomisili di sekitar TPS dipersilahkan masuk, tetapi bagi pemilih yang tidak bertempat tinggal di sana atau sebetulnya sudah terdaftar dalam DPT tetapi lokasi TPS-nya bukan di Kalibata. Petugas KPPS tersebut mengarahkan seorang pemilih tersebut ke lokasi TPS yang ditunjukkan oleh Sidalih. Hal ini tentunya dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan KTP dan patut dijadikan *best practice* bagi KPPS lainnya.

Salah satu persoalan yang mencuat menjelang pemungutan suara ialah adanya multitafsir fungsi C6. Berdasarkan ketentuan yang ada C6 memiliki fungsi sebagai surat pemberitahuan untuk memilih yang berisikan informasi lokasi pemilihan. Pada realitasnya, terdapat beberapa KPPS yang mengalihfungsikan C6 menjadi prasyarat untuk pemilih bisa memberikan suaranya. Di Ciracas Jakarta Timur, terdapat salah satu TPS terdapat anggota KPPS yang tidak memperkenankan pemilih yang tidak menunjukkan formulir C6 tidak diperbolehkan untuk memberikan suaranya sebelum pukul 12.00. Padahal ketentuan ini hanya berlaku untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme DPK. Sehingga dari sini nampak terdapat "*otonomi relatif*" dari KPPS untuk mengatur mekanisme pencoblosan yang akan dilakukan pemilih.

Dari aspek aksesibilitas proses pemungutan suara, hampir di keseluruhan TPS yang diamati sudah mendata pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT dan disiapkan kebutuhannya. Di Tebet Timur misalnya, beberapa TPS menyediakan template tuna netra. Sedangkan untuk akses TPS sendiri masih beberapa lokasi TPS yang jalannya berundak dan tentunya menyulitkan kursi roda melewatinya. Tetapi yang menarik ialah terdapat salah satu petugas KPPS di Tebet Timur yang berusaha untuk menjamin hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali termasuk kalangan lansia. Dengan mendatangi langsung ke rumah lansia tersebut bersama saksi membawa surat suara untuk dicoblos yang disaksikan oleh para saksi.

Setelah seluruh pemilih memberikan suaranya, dari hasil pantauan yang ada tidak didapati persoalan yang berarti dalam proses pemungutan suara. Secara keseluruhan dari TPS yang dipantau secara resmi menyudahi pemungutan suara pada Pukul 13.00. Tetapi penghitungan suara baru dimulai pukul 14.00 karena terdapat jeda istirahat untuk solat dan makan siang.

Pada proses penghitungan suara yang menarik untuk diamati ialah adanya dinamika partisipasi yang berbeda-beda di setiap TPS-nya. Hampir keseluruhan TPS yang diamati dipenuhi oleh para pemilih untuk menyaksikan proses rekapitulasi TPS tersebut. Di Tebet Timur, terdapat Pengawas TPS berbasis IT yang siap siaga memantau jalannya rekapitulasi.

Pada saat rekapitulasi dimulai, petugas KPPS membacakan hasil sah/tidak sah surat suara menggunakan nada yang lucu dengan selalu diakhir kata "Gitu dong" ketika banyak yang berteriak sah atau tidak sah. Dari sini semangat pengawasan partisipatif dari warga negara untuk menjamin kemurnian suara pemilih pun terjamin.

**Contact Person**

Khoirunnisa (Deputi Direktur Peludem): 08111866444

Fadli Ramadhanil: 085272079894

Heroik Pratama: 087839377707